

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Coronavirus Disease (Covid-19) membuat seluruh dunia dilanda kesulitan, Covid-19 kini sudah tersebar di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Jakarta menjadi tempat awal terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia, virus ini diduga dibawa oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang sedang menghadiri pesta dansa yang juga dihadiri oleh beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing lainnya, sehingga ia menularkan virus tersebut ke Warga Negara Indonesia yang melakukan kontak fisik sosial dengannya. Beberapa bulan kemudian Indonesia terus mengalami peningkatan kasus penyebaran Covid-19, belasan ribu orang telah dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar virus yang mematikan.

Beberapa perusahaan pun tutup karena terdampak pandemi Covid-19, tidak hanya itu, sektor pariwisata, sektor umkm, dan beberapa penggerak ekonomi Indonesia lainnya juga mengalami dampak dari pandemic Covid-19. Sehingga, pemerintah pun dibuat pusing untuk menentukan kebijakan apa yang tepat untuk menangani penyebaran kasus Covid-19 yang kian hari kian meningkat di Indonesia. Dalam menangani pandemi Covid-19 ini harus dengan kebijakan yang tepat dan cepat, sebab jika tidak tepat dan tidak cepat malah memperparah kondisi yang ada. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, karena lambannya respon pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga banyak Pemerintah Daerah yang memilih untuk “jalan sendiri” dalam menangani Covid-19 di wilayah mereka masing-masing tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

DKI Jakarta menjadi tempat penularan yang tinggi, disisi lain DKI Jakarta merupakan pusat jalannya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat harus bekerja sama untuk menangani penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta yang sering meningkat setiap harinya. Namun, pada awal penyebaran kasus pandemi Covid-19 ini hingga melonjaknya kasus di DKI Jakarta

Pemerintah Pusat belum juga membuat dan mengeluarkan kebijakan terkait penanganan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sigap membuat dan mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Beberapa kebijakan sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari membentuk Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta hingga membuat website yang berisikan informasi terkait Covid-19, baik mengenai pencegahan dan laporan kasus yang teridentifikasi di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Bahkan Pemerintah DKI Jakarta sudah mengajukan untuk menerapkan Lockdown di wilayah DKI Jakarta untuk menangani penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta, namun permintaan tersebut ditolak oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat baru membuat kebijakan dalam menangani Covid-19 setelah DKI Jakarta sudah jauh menerapkannya. Pemerintah Pusat baru membuat Gugus Tugas penanganan Covid-19 setelah DKI Jakarta membuat Tim Tanggap Covid-19. Selain itu, Pemerintah Pusat baru membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah menolak pengajuan Lockdown oleh Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat pun menganggap Pemerintahan Pusat lamban dalam menangani Covid-19 di Indonesia, dan menganggap Gubernur Anies Baswedan lebih tanggap dalam menangani kasus penyebaran Covid-19.

Perdebatan sengit antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan Covid-19 yakni Lockdown dan PSBB, Pemerintah DKI menginginkan Lockdown karena dianggap mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan cepat. Namun, Pemerintah Pusat tidak mengabulkan permintaan Pemerintah DKI Jakarta. Dengan alasan, menerapkan Lockdown akan mengeluarkan banyak anggaran karena harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama Lockdown berlangsung, dan menggantinya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, hingga akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun hanya mengikuti apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

6.2. Saran

Penanganan Covid-19 di Indonesia masih belum maksimal, karena masih adanya kasus yang terus bertambah setiap harinya. Pemerintah Pusat harusnya dapat merangkul Pemerintah Daerah untuk dapat menjalin kerja sama yang baik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Pusat harus lebih tanggap lagi dalam menangani pandemi Covid-19, untuk kebaikan rakyat dan Indonesia kedepannya. Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan kondisi masyarakat dan kondisi Indonesia pada saat pandemi Covid-19, tidak selalu memperhatikan perekonomian saja. Meskipun memang perekonomian memiliki peran yang penting untuk kesejahteraan Indonesia, namun kesehatan rakyat dan kesehatan Indonesia dari pandemi Covid-19 ini juga sangat penting. Untuk apa terlalu mengejar perbaikan perekonomian, jika kondisi negaranya sedang tidak baik-baik saja. Itu hanya akan menjadi gali lubang tutup lubang dalam masalah pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah DKI Jakarta memang sudah bagus dan tanggap dalam menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta dibandingkan dengan Pemerintah Pusat, akan tetapi Pemerintah DKI Jakarta dinilai terlalu ceroboh dalam mengambil kebijakan. Contohnya, Pemerintah DKI Jakarta masih menerapkan kebijakan Ganjil-Genap untuk kendaraan pribadi di wilayah DKI Jakarta. Namun, hal tersebut malah memicu penumpukan pada kendaraan umum seperti Busway, KRL, MRT, LRT, dan kendaraan umum lainnya. Akibatnya, penyebaran Covid-19 meningkat dengan sangat cepat karena adanya penyebaran melalui transportasi publik.